

EKSPLORASI SUMBER PENDANAAN DAN INVESTASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Takdirmin takdirmin¹, Fitriani fitriani², Fadila Nur Zakina³, Rahma Ramadhani Asri⁴,
^{1,2,3,4} Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar,
Indonesia

Alamat e-mail:

¹takdirmin@unismuh.ac.id ²fitrianiabid28@gmail.com ³fadilanurzakina@gmail.com
⁴rahmaramadhani012@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore various sources of funding and forms of investment in the education sector, both from the government, private sector, and non-profit institutions. The background of this study is based on the need for a sustainable and equitable education financing system, especially in the context of improving the quality and accessibility of education in Indonesia. A qualitative approach is used in this study with a literature study method. The results of the study indicate that there is great potential in diversifying education funding sources through public-private partnerships, education endowments, and outcome-based financing models. However, challenges such as transparency, accountability, and disparities in funding distribution are still major obstacles. This study recommends the need for more adaptive regulations and fiscal incentives to encourage sustainable investment in education. This research is expected to be the basis for formulating more inclusive and innovative education funding policies.

Keywords: Education funding, Investment, Public-private partnerships

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan dan bentuk investasi dalam sektor pendidikan, baik dari pemerintah, swasta, maupun lembaga non-profit. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan sistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan merata, terutama dalam konteks peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam studi ini dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi besar dalam diversifikasi sumber pendanaan pendidikan melalui kemitraan publik-swasta, dana abadi pendidikan, serta model pembiayaan berbasis hasil (outcome-based financing). Namun, tantangan seperti transparansi, akuntabilitas, dan kesenjangan distribusi pendanaan masih menjadi hambatan utama. Studi ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih adaptif serta insentif fiskal untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dalam

pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pendanaan pendidikan yang lebih inklusif dan inovatif.

Kata Kunci: Pendanaan pendidikan, Investasi, Kemitraan publik-swasta

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan taraf kehidupannya agar menjadi lebih baik kedepannya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2003). Pendidikan juga memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebuah bangsa (Subroto 2014). Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, akan, maka juga berpengaruh pada peningkatan tingkat produksi barang dan jasa (Susanto, D., & Rahma n.d.).

Salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia yang merdeka adalah untuk mencerdaskan bangsa (sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945). Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 juga menyebutkan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pasal ini kemudian dijabarkan lagi dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Selain itu, masih dalam Undang-undang yang sama, pasal 6 ayat 1 menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dari berbagai peraturan perundangundangan diatas, sangat jelas sekali seberapa besar tanggung jawab pemerintah terhadap mutu pendidikan bagi semua warga negara. Dalam menjalankan tuntutan tersebut negara berkewajiban menyusun kebijakan yang menjamin pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi (merata).

Amandemen pasal 31 UUD 1945 merupakan kebijakan pendidikan yang kemudian muncul setelah berkali-kali terjadi kompromi politik. Amandemen pasal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertegas komitmen pemerintah dan DPR pada pendidikan. Setelah mengalami berkali-kali amandemen pasal 31 telah memberikan jaminan kepada setiap warga untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 31 ayat 4 yang menegaskan bahwa negara mendapatkan amanat untuk memprioritaskan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun walaupun begitu dalam petunjuk pelaksanaannya sebagaimana yang tertulis dalam UU SIDIKNAS No 49 ayat 1 dinyatakan bahwa pemenuhan pendanaan dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah telah memproyeksikan pemenuhan anggaran pendidikan 20 % dari APBN diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan akan tercapai pada tahun 2009. Namun pada tahun 2008, kemudian keluar Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007

yang menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD tersebut termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (Rahmawati 2003).

Putusan dan peraturan tersebut mengakibatkan rendahnya pendanaan pendidikan di Indonesia tentu merupakan sebuah keprihatinan tersendiri bagi warga masyarakat. Pendidikan yang didanai secara murah ini menyebabkan mutu penyelenggaraan dan layanannya rendah. Hal ini kemudian berimbas pada mutu lulusan dan mutu pendidikan yang rendah. Padahal bila kita bercermin pada negara-negara maju, mereka cenderung mem- 3 belanjakan dana yang cukup besar untuk pendidikan mereka. Tingginya alokasi pendidikan di negara-negara maju tersebut terjadi karena meningkatnya political will pengambil keputusan terhadap pentingnya pendidikan.

Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pendanaan pendidikan yang menunjang terhadap keberlangsungan pendidikan (Susanto, D., & Rahma n.d.). Pendanaan pendidikan memainkan peran krusial dalam keberhasilan

sistem pendidikan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, proses pendidikan bisa terhambat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Pendanaan pendidikan memiliki peranan untuk investasi jangka panjang, seperti pembiayaan pelatihan untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan. Selain itu, Pendanaan pendidikan dapat membantu mempengaruhi kinerja guru dan staff sekolah dengan pemberian gaji yang baik. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hampir semuanya membutuhkan Pendanaan pendidikan. Sementara investasi pendidikan Investasi pendidikan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai masa depan generasi selanjutnya untuk dapat semakin bersaing dengan pasar kerja yang lebih luas. Hailwood menyatakan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan lebih jauh, kecakapan finansial disini juga lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan

keuangan, hingga bagaimana menerapkannya secara tepat (Fajar and Mulyanti 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana struktur pendanaan pendidikan terbentuk, tantangan dalam implementasinya, serta bagaimana investasi dalam pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia dan ekonomi bangsa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan informasi dan data dibantu dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai macam jurnal yang masih berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti (Sari, Milya 2020). Sumber data penelitian ini adalah buku, jurnal dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni pencarian data melalui catatan,

buku, makalah atau artikel, jurnal dan lain - lain (Mirzaqon, Abdi 2018). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi yaitu proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sumber Pendanaan Pendidikan

Sumber pendanaan pendidikan merujuk pada segala bentuk dukungan finansial yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik di tingkat formal maupun nonformal. Pendanaan ini mencakup pembiayaan untuk infrastruktur, operasional, pengembangan kurikulum, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kegiatan pembelajaran dan pelatihan siswa.

Pendanaan pendidikan adalah istilah yang mengacu pada pembagian sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Pendanaan pendidikan mencakup berbagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti

gaji guru, perbaikan infrastruktur, pembelian buku dan alat pembelajaran, dan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar (Moeliodihardjo 2018). Pendanaan juga termasuk biaya administrasi dan operasional sekolah. Hal ini sangat penting untuk menjamin pendidikan yang efisien dan efektif di seluruh jenjang (Suharsaputra 2020). Adapun sumber-sumber pendanaan Pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan Dari Pemerintah (APBN, APBD, DANA BOS)

Pemerintah merupakan aktor utama dalam pendanaan pendidikan nasional. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pendanaan dari pemerintah dialokasikan melalui mekanisme keuangan negara, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melalui program khusus seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketiga komponen ini memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan secara merata dan berkualitas (Fahrezi, Maulana, and Nurwahid 2025).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPR. APBN menjadi sumber utama pendanaan pendidikan secara nasional (Nadhifa Ardiana Maharani et al. 2024).

Peran APBN dalam pendidikan: Membiayai program-program pendidikan nasional (misalnya Kurikulum Merdeka, peningkatan kompetensi guru, beasiswa nasional), mendanai lembaga pendidikan di bawah kementerian (Kemdikbudristek, Kemenag). membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan secara nasional, memberikan subsidi pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer ke Daerah untuk sektor pendidikan. Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk fungsi pendidikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan disahkan oleh DPRD setempat. APBD berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat daerah (Fahrezi et al. 2025)

Peran APBD dalam pendidikan: mendanai operasional sekolah negeri di daerah, terutama jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di wilayahnya, membiayai kegiatan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan daerah, menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di daerah, menyokong program pendidikan daerah seperti pendidikan berbasis kearifan local, Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk pendidikan, sesuai amanat konstitusi.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS adalah program bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah dasar dan

menengah di seluruh Indonesia untuk mendukung kebutuhan operasional non-personalia secara langsung (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2003). Tujuan Dana BOS diantaranya adalah meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik, terutama dari kalangan ekonomi lemah, meningkatkan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah, mendorong pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah. Jenis Dana BOS diantaranya adalah BOS Reguler. Ini diberikan kepada seluruh sekolah negeri dan swasta yang memenuhi syarat. BOS Kinerja, ini diberikan kepada sekolah dengan kinerja tinggi dan inovatif. Kemudian ada BOS Afirmas yang diberikan kepada sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Sedangkan penggunaan Dana BOS diperuntukan untuk pembelian buku, alat tulis, dan alat pembelajaran, pembayaran honor guru honorer dan tenaga kependidikan, perawatan fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, ujian, dan pelatihan siswa serta langganan internet dan listrik. Adapun dasar hukumnya adalah Permendikbudristek No. 63 Tahun

2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

2. Pendanaan Dari Sektor Swasta CSR Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi. CSR tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga merupakan strategi bisnis jangka panjang yang bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dengan komunitas dan meningkatkan citra perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya.

CSR dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi sekolah dasar karena perusahaan sering kali menyalurkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial sebagai bentuk komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Pendidikan menjadi salah satu sektor utama yang sering menjadi sasaran

CSR karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contohnya, PT Internusa Jaya Sejahtera melalui program CSR-nya memberikan dukungan dana pendidikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga 50,7% (Sa'adah, S., & Azis 2023). Demikian pula, Bank BRI Syariah memberikan bantuan dana pendidikan dan dukungan infrastruktur untuk madrasah melalui CSR sebagai strategi memperkuat loyalitas nasabah dan kehadiran sosial perusahaan (Purwati 2023).

CSR juga digunakan sebagai sarana branding perusahaan. Dengan mendukung program pendidikan dasar, perusahaan memperoleh citra positif di mata masyarakat serta loyalitas pelanggan. Salah satu implementasi CSR di Sekolah Dasar adalah studi dari Losando (2023) pada sekolah Kristen di Indonesia Timur menunjukkan bahwa CSR menjadi sumber pendanaan yang signifikan dan berkelanjutan jika dikelola dengan akuntabilitas tinggi dan keterlibatan aktif masyarakat sekolah.

Sponsorship

Sponsorship adalah bentuk kerja sama antara sekolah dan perusahaan di mana perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lain dengan imbalan tertentu, seperti promosi merek atau nama baik. Sponsorship berbeda dari CSR karena bersifat lebih transaksional, tetapi tetap memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dasar.

Misalnya, dalam program "Astra Cerdas", PT Astra Agro Lestari memberikan beasiswa kepada siswa SD dan insentif kepada guru-guru honorer di sekolah binaannya sebagai bagian dari strategi kemitraan sosial dan pembinaan komunitas (Losando 2023). Sponsorship sering kali dilakukan dalam bentuk acara sekolah, lomba pendidikan, atau program pembangunan sarana, dengan identitas sponsor ditampilkan sebagai bagian dari kerja sama.

3. Pendanaan Dari Masyarakat

Pendanaan dari masyarakat masuk kedalam Komite sekolah, komite sekolah merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah dan jembatan dalam menyatukan visi serta misi berbagai unsur pendidikan di masyarakat untuk

meningkatkan kualitas pendidikan (Ghozali, M., & Ariskawanti 2022). Komite ini mewakili masyarakat, yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta individu yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Peran komite sangat penting terutama dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada (Gusmurdiah, S., Herawan, E. 2022).

Komite sekolah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, khususnya orang tua siswa, kepada lembaga pendidikan, sehingga mampu menghasilkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program-program tersebut tentu memerlukan dukungan pembiayaan dari masyarakat, yang disalurkan melalui komite sekolah. Namun, dalam proses pengumpulan dana dari masyarakat (terutama orang tua siswa), perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sekolah tidak boleh terlibat secara langsung dalam kegiatan pengumpulan dana ini agar

tidak menimbulkan anggapan sebagai pungutan liar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab komite sekolah (Fiandi Arif & Junaidi 2022).

4. Pendanaan Internasional

Pendanaan internasional memegang peranan penting dalam menunjang pengembangan pendidikan dasar di Indonesia, terutama dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. seperti Bank Dunia, Bagi Indonesia, setiap bantuan yang berasal dari Bank Dunia harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Dunia, termasuk dalam hal penyesuaian dengan regulasi hukum nasional. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Alokasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan. Dalam regulasi tersebut, dana bantuan

dari Bank Dunia yang dikenal sebagai *block grant* dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan penggunaan yang harus sesuai dengan ketentuan Bank Dunia. Ketentuan tersebut melarang penggunaan dana untuk insentif, perjalanan dinas, maupun biaya penelitian bagi guru, karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Dana tersebut hanya diperbolehkan untuk dialokasikan pada program seperti beasiswa peserta didik, pembangunan fasilitas sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peserta didik (Prakasa Wicaksana Unggul Satria 2018).

Investasi Dalam Pendidikan

Pendidikan sebagai Investasi

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama secara ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap

pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan disegala sektor. Ketidakyakinan ini misalnya terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Akibatnya alokasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya sisa setelah yang lain terlebih dahulu. Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor(Widiansyah 2017).

Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri(Widiansyah 2017).

Investasi dalam Pendidikan

Investasi pendidikan merupakan upaya strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penguatan demokrasi. Namun, di tengah kompleksitas sosial-ekonomi, terdapat tantangan dan peluang yang perlu dicermati agar investasi pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal.

Investasi pendidikan merujuk pada alokasi sumber daya (baik dana, waktu, maupun tenaga) untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi hasil jangka panjang seperti produktivitas tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan nasional (Becker, 1993). Investasi ini dapat dilakukan oleh individu, keluarga, pemerintah, maupun sektor swasta.

Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang atau jasa.

Kenneth J. Arrow dalam (Widiansyah 2017) mengemukakan bahwa istilah investasi atau investment merupakan alokasi current resources yang mempunyai alternatif produktif yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat menambah keuntungan yang diperoleh dimasa yang akan datang. Biaya atau cost suatu investasi merupakan keuntungan yang diperoleh dibagi dengan penggunaan sumber daya dalam berbagai kegiatan lain. Dengan demikian jelas bahwa investasi merupakan penanaman modal atau uang yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan keuntungan melalui produk yang dihasilkan.

Sementara itu pendidikan merupakan usaha manusia untuk membangun manusia itu sendiri dengan segala masalah dan spektrumnya yang terlepas dari dimensi waktu dan ruang. Hal ini berarti bahwa inti pendidikan itu adalah pembelajaran seumur hidup (life long learning), sementara bentuk pendidikan formal, pendidikan non formal (luar sekolah) dan sebagainya hanya merupakan modus operandi dari proses pendidikan. Pendidikan disini dimaksud untuk meningkatkan martabat manusia agar mempunyai

keterampilan dan kemampuan sehingga produktivitasnya meningkat. Oleh sebab itu maka hasil pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang sangat berguna dalam pembangunan suatu negara(Widiansyah 2017)

Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu. Dalam konteks ini pendidikan ini dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, artinya melalui pendidikan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan bagi perekonomian suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu dan pendapatan nasional. Dengan demikian maka investasi dalam pendidikan mempunyai jangka waktu yang panjang untuk dapat mengetahui hasilnya dan hasilnya itupun tidak dalam bentuk keuntungan langsung, melainkan keuntungan bagi pribadi yang menerima pendidikan dan bagi negara(Widiansyah 2017).

Tantangan dan Peluang dalam Investasi Pendidikan

Tantangan dalam Investasi Pendidikan:

- a. Kesenjangan Akses dan Kualitas
Masih terdapat disparitas antara daerah maju dan tertinggal dalam hal akses pendidikan. Infrastruktur yang buruk, kurangnya tenaga pengajar, dan minimnya sarana penunjang menjadi hambatan utama (UNESCO, 2021).
- b. Keterbatasan Anggaran
Meski pendidikan merupakan sektor prioritas, banyak negara berkembang belum mampu memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN seperti rekomendasi UNESCO (2021). Hal ini berdampak pada keterbatasan pengadaan sarana, pelatihan guru, dan program peningkatan mutu.
- c. Ketidaksesuaian Kurikulum dengan Dunia Kerja
Lulusan sering tidak memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia

- pendidikan dan dunia kerja (World Bank, 2018),
- d. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Keluarga dari golongan ekonomi lemah sering tidak mampu membiayai pendidikan anak hingga jenjang tinggi, memperparah siklus kemiskinan antargenerasi (OECD, 2019).
- e. Digital Divide
Transformasi digital mempercepat modernisasi pendidikan, namun masih banyak siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat dan internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) (Kemendikbudristek, 2021).
- Peluang dalam Investasi Pendidikan:**
- a. Teknologi Pendidikan
EdTech (education technology) memungkinkan pembelajaran jarak jauh, akses sumber belajar terbuka, dan personalisasi pembelajaran yang lebih efektif. Ini membuka kesempatan untuk menjangkau lebih banyak siswa (OECD, 2020).
- b. Kolaborasi Publik-Swasta
Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dapat mempercepat pemerataan pendidikan melalui program CSR, beasiswa, atau pelatihan vokasi yang terintegrasi (ADB, 2022).
- c. Peningkatan SDM sebagai Daya Saing Global
Negara yang konsisten menginvestasikan sumber daya pada pendidikan akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global karena tenaga kerjanya lebih produktif dan inovatif (Schultz, 1961).
- d. Reformasi Kebijakan
Adanya kebijakan seperti Merdeka Belajar di Indonesia menjadi peluang untuk memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan guru, serta mendorong inovasi dalam pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022).
- e. Dukungan Lembaga Internasional
Bantuan teknis dan dana hibah dari lembaga internasional seperti UNESCO, World Bank, dan UNICEF memberikan peluang untuk peningkatan kualitas pendidikan, terutama di negara-negara berkembang.

E. Kesimpulan

Simpulan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat vital bagi pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada tersedianya sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.

Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah (melalui APBN, APBD, dan Dana BOS), masyarakat, sektor swasta, serta bantuan lembaga internasional. Di antara semua sumber tersebut, pendanaan dari pemerintah menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, baik dari sisi operasional, pengembangan, hingga pemerataan akses pendidikan.

Investasi dalam pendidikan bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga mencerminkan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, daya saing bangsa, serta menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dana pendidikan yang transparan, tepat sasaran, serta

kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta kesadaran bersama akan pentingnya pendidikan, diharapkan sistem pendanaan dan investasi dalam pendidikan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas alokasi dan distribusi anggaran pendidikan, tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas penggunaannya, terutama dalam mendukung daerah tertinggal dan satuan pendidikan yang membutuhkan. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dalam pemanfaatan APBD untuk pendidikan, termasuk dengan memperhatikan kebutuhan riil sekolah di wilayahnya dan menghindari birokrasi yang menghambat penyaluran dana. Untuk Pihak sekolah harus mengelola dana pendidikan, khususnya Dana BOS, secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan prioritas siswa serta pengembangan mutu pembelajaran. Sedangkan Sektor

swasta diharapkan lebih aktif dalam berinvestasi di bidang pendidikan melalui program CSR, kemitraan, dan dukungan terhadap inovasi pendidikan yang berkelanjutan. Sementara Masyarakat dan orang tua siswa perlu diberdayakan dan dilibatkan secara lebih aktif dalam pengawasan dan perencanaan program pendidikan agar dana yang ada benar-benar mendukung kebutuhan siswa dan sekolah.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap penggunaan dana pendidikan, serta menyediakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi para pemangku kepentingan di satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrezi, Muhammad Adnan, Muhamad Pandu Maulana, and Muhammad Salman Nurwahid. 2025. "PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Pengembangan Pembelajaran) Kelas Dan." 8(1):101–10.
- Fajar, CM, and D. Mulyanti. 2019. "Meningkatkan Taraf Perekonomian Dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan." *Jurnal Abdimas BSI* 2(1):89–95.
- Fiandi Arif & Junaidi. 2022. "Sumber-Sumber Dana Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 6(6):10414–21.
- Ghozali, M., & Ariskawanti, E. 2022. "Peran Supporting Agency Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan." *Islamika Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 4(3):504–515. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1913>.
- Gusmurdiah, S., Herawan, E., & Sururi. 2022. "Efektivitas Kerja Sama Sekolah Dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 Sri." *Jurnal Basicedu* 6(6):10037–10046. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4218>.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Demographic Research* 49:1–33.
- Losando, R. 2023. "Strategi Kerja Sama CSR Sebagai Sumber Pendanaan Berkelanjutan Bagi Sekolah Kristen. Angelion." *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4(1):86–95. doi: <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jan/article/view/457>.
- Mirzaqon, Abdi, and Budi Purwoko. 2018. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library." *Jurnal BK UNESA* 3(1):1–8.
- Moeliodihardjo, B. 2018. *Pembangunan Pendidikan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nadhifa Ardiana Maharani, Fitri Hidayah, Diki Darmawan, and Syunu Trihantoyo. 2024. "Analisis Sumber Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 2(3):25–39. doi: 10.55606/jubpi.v2i3.3004.
- Prakasa Wicaksana Unggul Satria. 2018. "Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak EKOSOB; Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1). doi: <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/207>.
- Purwati, Y. 2023. "Strategi Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam Melalui CSR: Studi Kasus BANK BRI Syariah. Al-Idaroh." *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 5(1). doi: <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/207>.
- Rahmawati, Selly. 2003. "Analisis Kebijakan Pendanaan Pendidikan." *Zitteliana* 19(8):159–70.
- Sa'adah, S., & Azis, E. 2023. "Pengaruh Pemberian CSR Dana Pendidikan Dari PT. Internusa Jaya Sejahtera Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10(1). doi: <https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/15923>.
- Sari, Milya, and Asmendri. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6(1):41–53.
- Subroto, G. 2014. "Hubungan Pendidikan Dan Ekonomi: Perspektif Teori Dan Empiris." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3:20.
- Suharsaputra, U. 2020. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susanto, D., & Rahma, A. M. (n. d.). n.d. "Jenis-Jenis Pembiayaan Untuk Penyelenggaraan Pendidikan."
- Widiansyah, Apriyanti. 2017. "Peran Ekonomi Dalam Pendidikan Dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 17(2):207–15.